

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA PERIODE 2018-2021

¹Rama Aji Pradana, ²Fajar Syaiful Akbar

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

19013010159@student.upnjatim.ac.id, fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to provide an overview or results of financial performance in the Regional Government of the City of Surabaya for the 2018-2021 period. This research method is a quantitative descriptive statistics. The data collection technique uses observation, which is carried out by observing financial statements. This study uses secondary data, namely in the form of the Surabaya City Regional Government Budget Realization Report for the 2018-2021 period. This study uses financial ratio analysis: the ratio of the effectiveness of regional original income, the ratio of regional financial independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, and the ratio of spending harmony. The results of this study are the Financial Performance of the Regional Government of the City of Surabaya when viewed from the Effectiveness Ratio of Local Own Revenue during the 2018-2021 period on an average of 95.33%. Then from the Independence Ratio during the 2018-2021 period it is in the delegative category or is no longer dependent on central government assistance funds. Meanwhile, the Fiscal Decentralization Ratio during the 2018-2021 period averaged 95.33%. And the Regional Expenditure Ratio during the 2018-2021 period, the average Operational Expenditure Ratio was 76.69% and the Capital Expenditure Ratio was 26.00%.

Keywords: Regional Financial Performance, Effectiveness of Regional Original Income, Regional Financial Independence, Degree of Fiscal Decentralization, Operating Expenditure, Capital Expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran atau hasil kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya periode 2018-2021. Metode penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya periode 2018-2021. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan seperti: rasio efektifitas pendapatan asli daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian belanja. Implikasi penelitian ini mengenai kinerja keuangan adalah agar Pemerintah Kota Surabaya dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta melakukan pengendalian dan tindakan preventif yang lebih siap agar jika suatu saat Kota Surabaya mengalami krisis ekonomi kembali, pemerintah daerah bisa segera mengendalikan dengan cepat. Hasil penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya jika dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah selama periode 2018-2021 secara rata-rata sebesar 95,33%. Lalu dari Rasio Kemandirian selama periode 2018-2021 berada pada kategori delegatif atau sudah tidak bergantung pada dana bantuan pemerintah pusat, sedangkan dari Rasio Desentralisasi Fiskal selama periode 2018-2021 secara rata-rata sebesar 95,33% dan dari Rasio Belanja Daerah selama periode 2018-2021 secara rata-rata Rasio Belanja Operasinya sebesar 76,69% dan Rasio Belanja Modalnya sebesar 26,00%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Belanja Operasi, Belanja Modal.

Submitted: 7 Mei 2023

Revised: 10 Mei 2023

Accepted: 15 Mei 2023

Email korespondensi : 19013010159@student.upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada saat ini mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 2004. Kebijakan yang ditetapkan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan juga bisa melakukan tata kelola pemerintah yang baik, bisa menggali potensi di daerah sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat sehingga akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting pada kemajuan suatu daerah. Berkembang atau tidaknya suatu daerah akan tergantung pada bagaimana daerah tersebut melakukan cara mengelola keuangan. Oleh karena itu, untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada periode tertentu diperlukan adanya pengukuran kinerja. (Witono, 2021)

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan salah satu bagian penting bagi pemerintahan daerah dalam rangka pembiayaan dan penerapan berbagai macam proyek dan juga program yang direncanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dan memiliki fungsi bagi pemerintah yaitu sebagai sarana untuk menentukan besaran jumlah pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, dan juga sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengawasi perkembangan tiap daerah pada setiap periode anggaran, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran pada periode berikutnya, dan lain-lain. Kemampuan mengalokasikan sumber daya yang efektif dan efisien ini membutuhkan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan ke putusan. (Priono, 2018)

Salah satu aspek penting yang harus diatur dan diperhatikan secara serius bagi pemerintah daerah adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tersebut bisa memberikan dampak tersendiri terhadap kemajuan suatu daerah. Menurut Jatmika (2021) Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik tersebut bisa dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Dan juga, dapat juga dijadikan tolak ukur dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Analisis kinerja ini dapat menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat pengukuran.

Menurut Priono et al., (2019) kinerja adalah pencapaian dari apa yang direncanakan, baik secara pribadi, kelompok maupun organisasi. Kinerja diartikan baik jika pencapaiannya sesuai dengan rencana. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat untuk melakukan analisis kinerja ini secara luas telah banyak digunakan dan diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersil. Sedangkan pada lembaga/organisasi sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah penggunaan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan ini masih sangat terbatas. Padahal dari analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut bertujuan agar bisa diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan apakah berada dalam kategori baik atau kurang dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah. (Sari et al., 2021)

Menurut Aziz (2021) akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat general purposive yang artinya laporan keuangan dibuat secara sederhana dan lebih umum dengan tujuan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Namun laporan keuangan saja masih tidak dapat memberikan informasi yang spesifik dan lugas, apalagi sederhana. Oleh karena itulah diperlukan penelaahan lebih jauh, salah satu penelaahan inilah yang dinamakan analisis rasio keuangan. Ketidakmampuan memahami laporan keuangan dapat dipermudah dengan memakai analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan teknik yang banyak dipergunakan untuk menganalisis suatu laporan keuangan.

Menurut Jatmika (2021) analisis rasio keuangan yaitu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran yang tersedia. Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah, yaitu diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja. Analisis ini diharapkan bisa menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dalam upaya untuk merealisasikan pendapatan daerah dan juga untuk mengukur kontribusi sumber pendapatan masing-masing daerah. Sehingga Pemerintah Daerah bisa melakukan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan

mengontrol Belanja Daerah agar bisa sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak sampai defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pemerintah daerah yang juga menyelenggarakan otonomi daerah yang efektif. Dalam mengelola anggarannya Pemerintah Kota Surabaya selalu memperhatikan tentang keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran Aziz (2021). Berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Ini adalah opini WTP kesembilan kali yang diraih secara berturut-turut oleh Pemkot Surabaya. Bahkan nilainya tertinggi se-kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan otonomi daerah yang didukung oleh berbagai faktor yang mana yang paling utama adalah faktor keuangan.

Terjadinya krisis ekonomi yang dialami Pemerintah Kota Surabaya pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 memang tidak bisa dikendalikan dengan cepat. Berulang kali Pemerintah Kota Surabaya melakukan refocusing pada APBD. Dana yang seharusnya dianggarkan untuk berbagai kegiatan, terpaksa sebagian besar dialihkan untuk mengatasi dampak dari virus korona. Secara garis besar, terdapat perbedaan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya yaitu dalam periode 2018-2021, dana belanja daerah selalu lebih besar dibandingkan dana pendapatan daerahnya. Dan juga pendapatan daerah Kota Surabaya juga tidak bisa mencapai target selama 2 periode. Tentu hal tersebut perlu diperhatikan karena dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Surabaya tidak baik.

Tabel 1. Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja Kota Surabaya 2018-2021

Tahun	Realisasi Total Pendapatan	Realisasi Total Belanja	Keterangan
2018	Rp 8.175.219.120.669	Rp 8.176.929.496.299	Defisit
2019	Rp 8.765.153.020.783	Rp 9.162.655.939.832	Defisit
2020	Rp 7.545.416.994.176	Rp 8.032.680.988.065	Defisit
2021	Rp 8.326.878.076.226	Rp 7.819.077.321.546	Surplus

Su
mb
er :
Dat
a
Dio
lah

(2022)

Berdasarkan data pada tabel 1 didapati bahwa dari 4 periode tersebut, terdapat 3 periode dengan dana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Tahun anggaran 2020 merupakan masa paling sulit yang dialami semua daerah di Indonesia khususnya Kota Surabaya akibat dari pandemi Covid-19. Realisasi total pendapatan Kota Surabaya tahun 2020 merupakan yang paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan sesudahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya juga ikut turun. Faktor utamanya, tidak ada perputaran uang. Pendapatan warga anjlok karena pandemi dan perekonomian di Surabaya juga ikut tersendat. Terlebih lagi ketika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, yang mana hal itu berpengaruh terhadap mobilitas perekonomian masyarakat sehari-hari.

Penelitian ini baru menggunakan data laporan keuangan selama (4) empat tahun terakhir dan belum menggunakan metode wawancara atau kuisisioner untuk mengetahui lebih lanjut kendala dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menggunakan deskriptif kuantitatif, diharapkan agar penelitian selanjutnya bisa mengembangkan beberapa metode uji data pada penelitian ini. Penelitian ini juga baru menggunakan empat rasio keuangan saja dari keseluruhan rasio kinerja keuangan. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan beberapa variabel dan indikator kinerja keuangan serta menambah periode pengamatan agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Kebaruan penelitian ini adalah tahun pengamatan yang menggunakan 2018-2021 dan menggunakan fenomena permasalahan terbaru seperti krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 sebagai bahan penelitian.

Menurut Perwita Sari et al., (2018), dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa ukuran kinerja, antara lain derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio harmoni, rasio cakupan layanan utang, dan pertumbuhan. Penggunaan analisis rasio sebagai alat pelaporan keuangan sudah banyak diterapkan pada lembaga komersial, namun tidak pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah yang masih sangat terbatas. Selain itu, penilaian

keberhasilan APBD sebagai penilaian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga tidak memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi atau struktur APBD. Jadi, secara teori belum ada kesepakatan bulat tentang nama dan kaidah pengukuran dalam analisis rasio organisasi sektor publik khususnya APBD.

Penelitian Aziz (2021) yang melakukan penelitian kinerja keuangan kota Surabaya periode 2015-2019 belum bisa menampilkan hasil yang lengkap dikarenakan penelitian tersebut hanya menggunakan 3 rasio keuangan saja sebagai variabel penelitian. Dan juga penelitian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik perbedaan hasil kinerja keuangan tiap periode tersebut. Jadi, peneliti ingin melakukan pengembangan dari penelitian tersebut dengan memakai 4 rasio keuangan dan menggunakan 4 periode laporan dikarenakan pada salah satu periode tersebut kota Surabaya mengalami krisis ekonomi yang akan menjadi pembeda hasil penelitian milik peneliti dengan milik Aziz (2021). Tujuannya untuk bisa menyajikan informasi kepada masyarakat seputar hasil kinerja keuangan pemerintah Surabaya dan bisa dijadikan bahan referensi untuk evaluasi apabila kota Surabaya mengalami krisis ekonomi lagi kedepannya.

Penelitian Handayani (2017) melakukan penelitian menganalisis kinerja keuangan dalam pengelolaan APBD kota Surabaya tahun 2012-2015. Penelitian tersebut belum bisa memberikan informasi yang melihat kinerja keuangan itu baik atau belum dalam periode tersebut dikarenakan penelitian tersebut hanya menggunakan rasio desentralisasi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan pendapatan. Para pembaca tidak mengetahui sebaik apa Pemerintah Surabaya dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Lalu juga tidak mengetahui pengelolaan anggaran belanja daerah kota Surabaya apakah baik atau belum. Oleh karena itu, penelitian milik peneliti dilakukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas lagi dengan menambahkan rasio belanja daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

Dari penjabaran berbagai penelitian diatas, membuat peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya pada periode 2018-2021 untuk bisa memberikan gambaran seperti apakah hasil kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya pada saat kota Surabaya mengalami masa krisis ekonomi yang melanda. Jadi, hasil penelitian ini

bisa dijadikan bahan referensi bagi pihak pembaca khususnya pihak pemerintah Kota Surabaya agar pada saat Kota Surabaya mengalami krisis ekonomi lagi kedepannya, pemerintah Surabaya bisa segera tanggap menentukan kebijakan yang tepat agar bisa tetap menjaga keseimbangan keuangan kota Surabaya pada saat mengalami krisis ekonomi lagi. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka peneliti merumuskan masalah yakni bagaimanakah tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Konsep teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Teori agensi dapat diterapkan dalam organisasi publik pemerintah daerah yang berperan sebagai principal merupakan masyarakat dan agent merupakan pihak pemerintah.

Hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agent (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari pengelolaan keuangan pendapatan dan belanja daerah yang dilihat dari laporan realisasi anggaran.

Prinsipal memiliki kewenangan pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen berupa pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Konflik teori keagenan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah daerah) dapat dikurangi dengan hasil kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib menghasilkan kinerja keuangan yang memuaskan bagi masyarakat karena jika kinerja keuangan pemerintah daerah memuaskan maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah dan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Masyarakat perlu melihat hasil kinerja keuangan pemerintah daerah tiap periodenya agar jika ada penurunan, pemerintah bisa mengevaluasi penurunan tersebut.

Kinerja Keuangan

Menurut Aisyah (2019) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan - aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan juga merupakan hal yang penting untuk dikaji dalam suatu organisasi sektor publik termasuk pemerintahan. Setelah diberlakukannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Susanto (2019) pengukuran kinerja merupakan suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Sementara kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggung jawaban daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah Daerah

Menurut Munawaroh (2019) Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama dalam UU No. 2 Tahun 2015 dan Perubahan Kedua dalam UU No. 9 Tahun 2015) menandai suatu babak baru kebijakan otonomi dan relasi Pusat-Daerah hari ini. Penataan ulang urusan, penguatan kedudukan Gubernur dan pemerintahan Propinsi, hingga pengenalan konsep manajemen tranisasi berupa status daerah persiapan dalam pemekaran wilayah hanyalah sebagian contoh yang bisa disitir sebagai butki perubahan. Tentu, dalam pola dan warna relasi pemerintah pusat dengan daerah, berbagai perubahan yang ada sedikit banyak membawa dinamika baru dalam pengelolaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kartoprawiro & Susanto (2018) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), ketika memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan secara objektif data-data yang sudah dikumpulkan untuk menguji kinerja keuangan. Metode deskriptif ini bertujuan mengetahui sifat antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara spesifik agar bisa memperoleh data yang sesuai.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi yaitu dilakukan dengan melakukan pengamatan laporan keuangan yang ada dalam dokumen instansi pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya berupa Laporan Keuangan tahun 2018-2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari instansi

dalam bentuk angka, seperti laporan anggaran atau realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 - 2021.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data realisasi anggaran yang diperoleh dari website pemerintah kota Surabaya yang bersumber dari instansi dalam bentuk angka, seperti laporan anggaran atau realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 - 2021.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan- perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan dari deskriptif kuantitatif pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran selama 4 periode yaitu 2018 - 2021 yang didapatkan dari website pemerintah kota Surabaya.
2. Melakukan perhitungan dari data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran per periode dalam 4 periode keuangan yang sudah ditentukan dengan menggunakan Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja.
3. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan dengan menggunakan Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja.
4. Menganalisis pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan Rasio Efektivitas Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Keserasian Belanja.
5. Menyusun Kesimpulan

Indikator Pengukuran Rasio Keuangan

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi (pengelolaan) penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun rumus Rasio Efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mahsun (2013:187), adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya. Berikut Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsulatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Mahmudi (2016:140)

Adapun penjelasan dari tabel 2 sebagai berikut

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominandari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampumelaksanakan otonomi daerah)

2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini merupakan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah. Berikut Rumus rasio desentralisasi fiskal :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal	Pola Hubungan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,00 - 30,00	Sedang
30,00 - 40,00	Cukup
40,00 - 50,00	Baik
Diatas 50,00	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi (2016:141)

Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini mempertimbangkan bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanjaoperasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (Mahmudi, 2016:162). Rumus dari rasio belanja operasi ini adalah :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2016:162). Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil dari rekapitulasi data yang diperoleh selama periode penelitian yang disusun dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

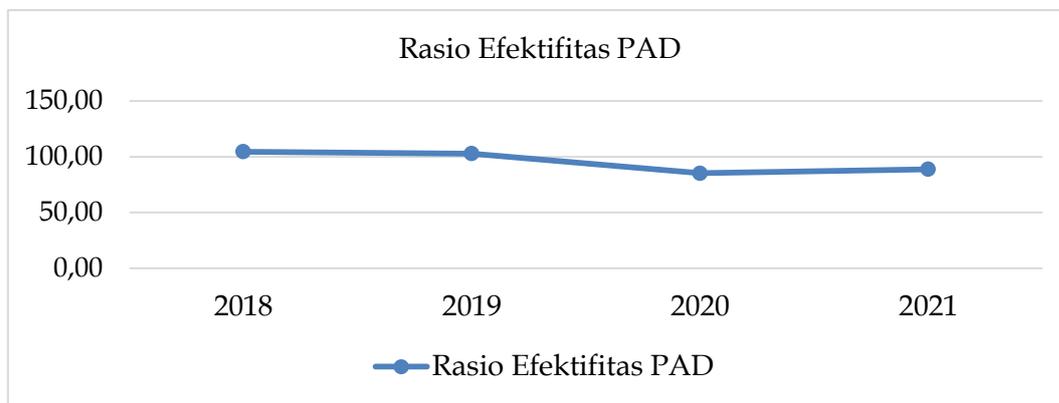
**Tabel 4 Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya
2018 -2021**

Tahun	Realisasi PAD	Target/Anggaran PAD	Presentase (%)	Kriteria Rasio
2018	Rp4.973.031.004.727,10	Rp4.758.967.236.960,00	104,50	Sangat Efektif
2019	Rp5.381.920.253.809,67	Rp5.234.687.226.266,00	102,81	Sangat

Tahun	Realisasi PAD	Target/Anggaran PAD	Presentase (%)	Kriteria Rasio
				Efektif
2020	Rp4.289.960.292.372,98	Rp5.035.094.239.075,00	85,20	Tidak Efektif
2021	Rp4.727.280.629.669,69	Rp5.322.810.142.550,00	88,81	Tidak Efektif
Rata-Rata			95,33	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah (2023)

Grafik 1 Rasio Efektifitas PAD



Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tabel 4, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah secara rata-rata 4 periode sebesar 95,33% atau berada pada kategori tidak efektif. Hal tersebut juga terlihat pada grafik 1 yang mana menunjukkan bahwa rasio efektifitas PAD mengalami penurunan dari 2018-2020 dan kenaikan dari 2020 ke 2021.

Pada 2018 dan 2019 Kota Surabaya berada pada kategori efektif yaitu pada 2018 sebesar 104,50% dan 2019 sebesar 102,81%. Sedangkan pada 2020 dan 2021, terlihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Pada 2020 berada dalam kategori tidak efektif dikarenakan Kota Surabaya dan berbagai daerah di Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, sehingga membuat pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak mencapai target secara keseluruhan.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2018-2021 berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 95,33%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan tidak efektif atau tidak maksimal dalam pengelolaan realisasi pendapatan Kota Surabaya.

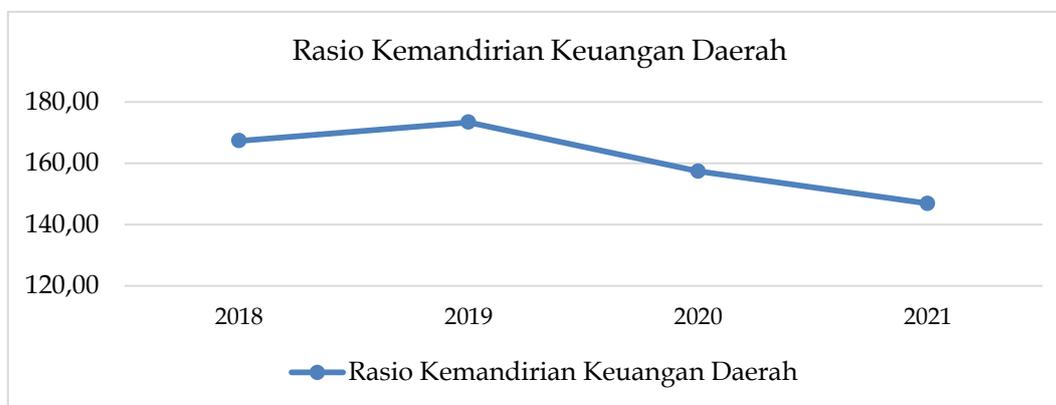
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya 2018 - 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Presentase (%)	Kriteria Rasio
2018	Rp4.973.031.004.727,10	Rp2.971.893.970.892,00	167,34	Delegatif
2019	Rp5.381.920.253.809,67	Rp3.104.324.585.538,00	173,37	Delegatif
2020	Rp4.289.960.292.372,98	Rp2.725.829.859.924,00	157,38	Delegatif
2021	Rp4.727.280.629.669,69	Rp3.218.952.114.659,00	146,86	Delegatif
Rata-Rata			161,24	Delegatif

Sumber : Data Diolah (2023)

Grafik 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 5, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya secara rata-rata 4 periode sebesar 161,24% atau berada pada kategori delegatif. Kategori delegatif yaitu menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat/provinsi sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Terlihat pula pada grafik 2 yang

menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2021 grafik kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan.

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat tergolong sangat tinggi, yang mana masuk pada kategori delegatif, artinya peranan pemerintah pusat sudah tidak ada, dengan kata lain pemerintah daerah telah mampu/mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya, karena rata-rata berada pada nilai maksimum rasio kemandirian keuangan daerah yaitu diatas 100%.

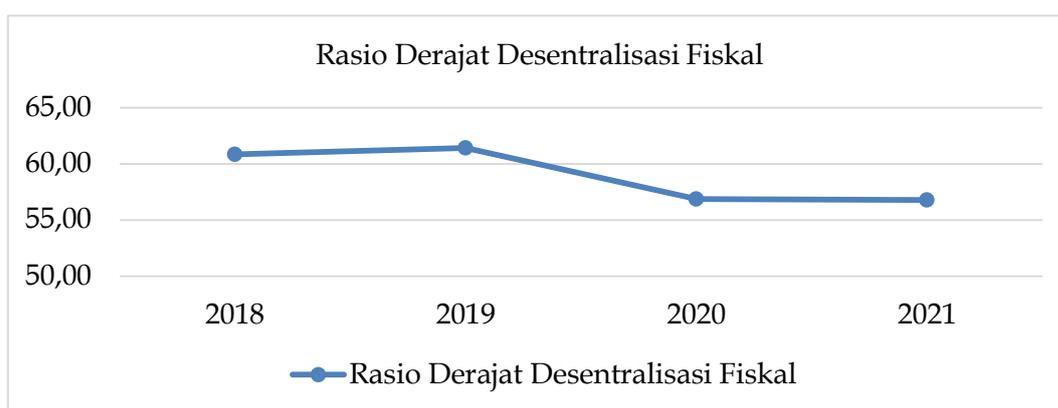
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 6 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Surabaya 2018 -2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Presentase (%)	Kriteria Rasio
2018	Rp4.973.031.004.727,10	Rp8.175.219.129.669,10	60,83	Sangat Baik
2019	Rp5.381.920.253.809,67	Rp8.765.153.020.782,67	61,40	Sangat Baik
2020	Rp4.289.960.292.372,98	Rp7.545.416.994.175,97	56,86	Sangat Baik
2021	Rp4.727.280.629.669,69	Rp8.326.878.076.226,29	56,77	Sangat Baik
Rata-Rata			58,96	Sangat Baik

Sumber : Data Diolah (2023)

Grafik 3 Derajat Desentralisasi Fiskal



Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tabel 6, menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Surabaya secara rata-rata 4 periode berada pada kategori sangat baik. Pada 2019 merupakan

periode dengan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya yang paling tinggi dibandingkan 3 periode lainnya, yaitu sebesar 61,40%. Berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran dengan rasio rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2018-2021 berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 58,96%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik dalam memobilisasi pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Surabaya selama 4 periode. Terlihat pada grafik 3 menunjukkan bahwa grafik derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya mengalami penurunan dari 2019-2021. Pada 2019 merupakan periode dengan rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya yang paling tinggi dipandingkan 3 periode lainnya, yaitu sebesar 61,40%.

Rasio Keserasian Belanja Daerah

Tabel 7 Rasio Belanja Operasi Kota Surabaya 2018 -2021

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Presentase (%)
2018	Rp5.731.527.814.355,18	Rp8.176.929.496.298,63	70,09
2019	Rp6.404.557.852.973,57	Rp9.162.655.939.831,57	69,90
2020	Rp6.439.039.886.246,00	Rp8.032.680.988.065,47	80,16
2021	Rp6.771.433.976.328,20	Rp7.819.077.321.545,57	86,60
Rata-Rata			76,69

Sumber : Data Diolah (2023)

Grafik 4 Belanja Operasi



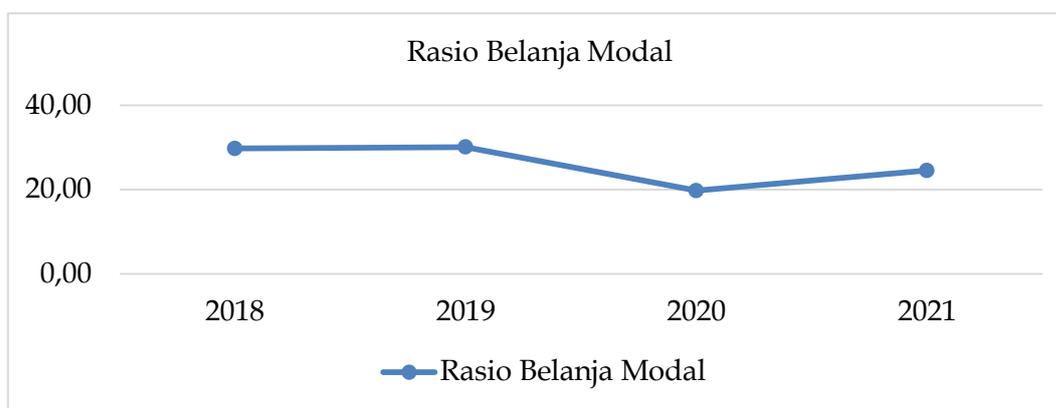
Sumber : Data Diolah (2023)

Tabel 8 Rasio Belanja Modal Kota Surabaya 2018 -2021

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Presentase (%)
2018	Rp2.430.061.039.309,45	Rp8.176.929.496.298,63	29,72
2019	Rp2.754.304.824.082,00	Rp9.162.655.939.831,57	30,06
2020	Rp1.583.663.159.605,00	Rp8.032.680.988.065,47	19,72
2021	Rp1.916.336.503.390,00	Rp7.819.077.321.545,57	24,51
Rata-Rata			26,00

Sumber : Data Diolah (2023)

Grafik 5 Belanja Modal



Sumber : Data Diolah (2023)

Berdasarkan data perhitungan rasio keserasian belanja daerah pada tabel 7 dan 8, rasio belanja operasi dan belanja modal selama tahun 2018 - 2021 sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal, sehingga rasio belanja modal Kota Surabaya relatif tidak terlalu besar. Selama tahun 2018 - 2021 rata-rata pengalokasian dana untuk belanja operasi sebesar 76,69%, sedangkan rata-rata pengalokasian dana untuk belanja modal sebesar 26,00% angka ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dibandingkan rasio belanja modal.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran dengan rasio keserasian belanja daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun anggaran 2018-2021 berkisar pada rata-rata nilai rasio sebesar 76,69% dan 26,00%. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata 4 periode, kinerja Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik dalam mengalokasikan dana baik untuk belanja operasi maupun belanja modal sehingga tetap terkendali dan tetap bisa mengendalikan dana untuk belanja daerah pada Kota Surabaya selama 4 periode.

Ringkasan hasil penelitian mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 9 Ringkasan Analisis Rasio Kinerja Keuangan Kota Surabaya 2018 -2021

No.	Analisis Kinerja Keuangan	Rata-rata Hasil Rasio	Keterangan
1	Rasio Efektivitas PAD	95,33%	Tidak Efektif
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	161,24%	Delegatif
3	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	58,96%	Sangat Baik
4	Rasio Keserasian Belanja Daerah		
	a. Belanja Operasi	76,69%	Cukup Tinggi
	b. Belanja Modal	26,00%	Rendah

Sumber : Data Diolah (2023)

Analisis kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum bisa dibilang baik karena berdasarkan perhitungan rasio-rasio diatas yang sudah dilakukan, pemerintah Kota Surabaya masih belum bisa menstabilkan antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi dana belanja daerah. Pada periode 2018- 2020, pengeluaran dana untuk alokasi dana belanja daerah selalu melebihi total dana pendapatan daerah. Hanya pada periode 2021 saja pengeluaran dana untuk alokasi dana belanja daerah yang berada dibawah dana pendapatan daerah, san juga kinerja keuangan pemerintah Kota Surabaya menunjukkan kinerja yang tidak efektif dalam pengelolaan realisasi pendapatan asli daerah. Tentu perlu ada pembenahan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah tersebut agar bisa terkedali kembali secara normal pada periode selanjutnya.

1. Tingkat rasio efektivitas pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 mengalami penurunan sehingga membuat secara rata-rata 4 periode, rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya berada pada kategori tidak efektif. Penurunan rasio ini mulai terjadi pada tahun 2020 yang mana hal tersebut terjadi diakibatkan Kota Surabaya mengalami krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surabaya masih tidak siap dalam melakukan pengendalian keuangan pada saat Kota Surabaya mengalami krisis ekonomi secara tiba-tiba. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus untuk bisa dievaluasi agar bisa menjadi lebih baik. Hal

tersebut perlu dilakukan karena jika Kota Surabaya mengalami krisis ekonomi kembali secara tiba-tiba, pemerintah daerah bisa lebih siap melakukan berbagai upaya agar bisa mengendalikan krisis tersebut agar permasalahan kinerja keuangan yang terjadi pada 2020 tidak terulang kembali saat Kota Surabaya mengalami keadaan krisis ekonomi kembali pada kedepannya.

Masyarakat sebagai pihak prinsipal tentu mengharapkan kinerja keuangan yang maksimal dari pihak pemerintah daerah sebagai pihak agen. Masyarakat memiliki kewenangan pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen berupa pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pada 2020 dan 2021, tingkat pendapatan asli daerah dari pos pajak daerah dan retribusi daerah tidak mencapai target. Besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah saling berkaitan dalam kondisi permasalahan tersebut.

Penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian milik Muarif (2019) yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017. Hasil rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 secara rata-rata berada pada kategori tidak efektif. Sedangkan penelitian milik peneliti juga menunjukkan rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya secara rata-rata pada 2018-2021 berada pada kategori tidak efektif.

Akan tetapi penelitian peneliti memiliki hasil yang berbeda dengan hasil dengan penelitian milik Aziz (2021) yang berjudul analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya tahun 2015-2019. Hasil rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya secara rata-rata pada 2015-2019 berada pada kategori sangat efektif. Sedangkan penelitian milik peneliti menunjukkan bahwa rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kota Surabaya secara rata-rata pada 2018-2021 berada pada kategori tidak efektif.

2. Tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode mengalami penurunan pada 2020 dan 2021. Meskipun begitu, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya tetap berada

pada kategori delegatif atau campur tangan pemerintah pusat/provinsi sudah tidak ada karena Kota Surabaya telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Hal tersebut perlu diperbaiki dikarenakan secara 4 periode tersebut, pada periode 2021 merupakan periode dengan bantuan dana transfer terbesar dibandingkan 3 periode sebelumnya. Tetapi secara rata-rata, tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya tetap sangat baik.

Hasil rasio kemandirian keuangan daerah tersebut juga berkaitan dengan teori agensi pada penelitian ini. Teori agensi pada penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya oleh pertumbuhan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kondisi tersebut akan memacu peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan pendapatan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk makin giat membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya. secara rata-rata 4 periode, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya berada pada kategori delegatif atau sudah mampu membiayai daerahnya sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mampu atau sangat baik dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian milik Fitri (2022) yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19. Hasil rasio kemandirian keuangan daerah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori delegatif sudah tidak bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan penelitian milik peneliti juga menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya selama rata-rata 4 tahun berada pada kategori delegatif atau sudah tidak bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

Akan tetapi penelitian peneliti memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian milik Marliani (2022) berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bandung tahun 2016-2020. Hasil rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori instruktif atau sangat bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan penelitian milik peneliti menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya selama rata-rata 4 tahun berada pada kategori delegatif atau sudah tidak bergantung pada bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

3. Tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode berada pada kategori sangat baik. Akan tetapi tetap perlu dilakukan pengendalian kembali karena pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Perlu dilakukan evaluasi agar penurunan tersebut bisa segera diatasi dan derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya bisa naik lagi pada periode selanjutnya.

Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal tersebut juga berkaitan dengan teori agensi pada penelitian ini. Teori agensi pada penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Derajat desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan argumentasi alokasi anggaran untuk barang publik lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena keunggulan informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah mampu menghasilkan rasio derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik selama 4 periode sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang membuat dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.

Penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian milik Handayani (2017) yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD Kota Surabaya Tahun 2012-2015. Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Surabaya Tahun 2012-2015 secara rata-rata berada pada

kategori Sangat baik. Sedangkan penelitian milik peneliti juga menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode berada pada kategori sangat baik.

Akan tetapi penelitian peneliti memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian milik Jatmika (2021) berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua dimasa Pandemi Coved-19. Hasil rasio derajat desentralisasi fiskal Provinsi Papua dimasa Pandemi Coved-19 secara rata-rata berada pada kategori sangat kurang. Sedangkan penelitian milik peneliti juga menunjukkan rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode berada pada kategori sangat baik.

4. Tingkat rasio keserasian belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode pada belanja operasi mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir dan pada belanja modal mengalami peningkatan meskipun pada 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya masih dalam kategori cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam belanja modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunan daerah.

Hasil rasio belanja daerah tersebut juga berkaitan dengan teori agensi pada penelitian ini. Teori agensi pada penelitian ini menunjukkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, sehingga anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD seharusnya dikelola dengan baik dan dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan dicapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja suatu pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah

daerah dan arah pembangunan daerah, maka itu analisis terhadap belanja seharusnya dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi dan koreksi. Belanja yang dilakukan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut

Penelitian ini memiliki hasil penelitian yang sama dengan penelitian milik Fitri (2022) yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan selama pandemi covid-19. Hasil rasio belanja daerah provinsi DKI Jakarta secara rata-rata 4 tahun berada pada batas wajar. Sedangkan penelitian milik peneliti juga menunjukkan rasio belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode juga berada pada kategori batas wajar.

Akan tetapi penelitian peneliti memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian milik Marliani (2022) berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten bandung tahun 2016-2020. Hasil rasio belanja daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 4 tahun berada pada kategori cukup tinggi. Sedangkan penelitian milik peneliti menunjukkan rasio belanja daerah pemerintah daerah Kota Surabaya periode 2018-2021 secara rata-rata 4 periode berada pada kategori batas wajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio keuangan yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio efektivitas pendapatan asli daerah secara rata-rata dalam 4 periode tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata dalam 4 periode tergolong dalam pola hubungan delegatif yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya sangat mampu dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal secara rata-rata dalam 4 periode tergolong sangat baik. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang diukur dengan rasio keserasia belanja daerah secara rata-rata dalam 4 periode rata-rata rasio belanja operasi dan rasio belanja modal berada dalam batas wajar.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya periode 2018 - 2021 yang ditinjau dari analisis rasio keuangan. Implikasi dari penelitian ini mengenai kinerja keuangan adalah mendorong penelitian selanjutnya untuk menambah periode pengamatan penelitian dan kedetailan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari analisis rasio keuangan. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya diharapkan agar dapat meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta melakukan pengendalian dan tindakan preventif yang lebih siap agar jika suatu saat Kota Surabaya mengalami krisis ekonomi kembali, pemerintah daerah bisa segera mengendalikan dengan cepat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebaiknya perlu sedikit mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan daerahnya, karena selama tahun 2018 - 2021 tingkat pengeluarannya rata-rata lebih besar dibandingkan tingkat penerimaan pendapatannya. Pada 2020 dan 2020 pendapatan Kota Surabaya masih belum bisa mencapai target. Jika tidak ada evaluasi, maka bisa jadi periode berikutnya realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tidak mencapai target lagi dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah Surabaya yang tidak maksimal.

Peneliti selanjutnya sebaiknya lebih rinci dalam menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dengan memperpanjang periode pengamatan penelitian. Peneliti selanjutnya sebaiknya perlu melakukan penambahan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara untuk mengetahui penyebab kenaikan dan penurunan pada keuangan suatu daerah tersebut.

Adapun keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian ini baru menggunakan data laporan keuangan selama (4) empat tahun terakhir dan belum menggunakan metode wawancara atau kuisioner untuk mengetahui lebih lanjut kendala dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini hanya

menggunakan deskriptif kuantitatif, diharapkan agar penelitian selanjutnya bisa mengembangkan beberapa metode uji data pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 3(2), 21–25.
<https://doi.org/10.35906/jm001.v3i2.304>
- Anthony, N. Robert dan Govindarajan, Vijay. 2011. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jilid 2. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Aisyah, A. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Laba Perusahaan Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Malindo Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo, 3(2), 21–25.
<https://doi.org/10.35906/jm001.v3i2.304>
- Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid- 19*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 12(1), 11–15.
<https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.63>
- Hidayah, Z., & Witono, B. (2021). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019*. Seminar Nasional Kewirausahaan UMSU, 2(1), 217–228.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). *Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v16i1.6242>
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajagrafindo. Persada.
- Munawaroh, N. (2019). *Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik*. Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No., 143–156.
- Nuzulul Siswo Abdulaziz. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019*. Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN), 1(2), 646–659. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.142>
- Perwita Sari, R., Tjahjono, H., (2018). *Analysis Of Financial Performance In Public Sector*

(A Case Study in Lamongan, East Java-Indonesia). JASF Journal of Accounting and Strategic Finance, 1(1), 82–90. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i01.35>

Priono, H. (2018). *Pengaruh Manfaat Komputerisasi dan Faktor Demografi End - User Computing terhadap Penyediaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Pelayaran di Wilayah Surabaya. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 9(2), 442–459.*

Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., & Puspitasari, D. S. (2019). *Role of financial management in the improvement of local government performance. Humanities and Social Science Reviews, 7(1), 77–86. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7110>*

Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September, 408–425.*